

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dimana demokrasi itu dapat dijalankan di berbagai tingkatan mulai dari pusat sampai ke tatanan daerah. Pilkada merupakan wujud dari demokrasi yang tetap harus dijaga dan dipelihara. Perhelatan pilkada tidak terlepas dari partai politik yang melakukan ikhtiar untuk mengusung calon kepala daerah dengan melakukan gerakan politik kolektif demi memenangkan kontestasi. Fenomena gerakan partai politik tersebut dinamakan koalisi. Hal demikian terjadi karena Indonesia menganut sistem multipartai dan terdapat *threshold* yang mengharuskan masing-masing partai politik melakukan koalisi setiap momentum pilkada digelar. Maka, selalu dijumpai calon kepala daerah yang diusung oleh gabungan partai politik. Dengan partai politik mengkonsolidasi dengan koalisi sehingga terbukanya peluang menang yang lebih besar, ditambah suara konstituen mustahil dimenangkan hanya oleh satu partai. Lebih dari itu, koalisi merupakan keniscayaan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomous*), dan tahan lama (*durable*) (Cipto, 2000).

Pembentukan koalisi acap kali mengalami dinamika yang panjang karena banyak pertimbangan partai yang kemudian ditinjau dan diamati secara seksama sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama. Faktor-faktor mengenai koalisi partai politik dapat dibentuk secara dominan, dipengaruhi oleh orientasi dan ideologi yang selaras. (Ambardi, 2009) menekankan bahwasannya koalisi direalisasikan berkenaan dengan program-program yang bersifat ideologi merupakan prioritas utama, maka untuk partai politik yang memiliki keidentikan ideologi yang sama senantiasa didorong untuk membentuk koalisi. Koalisi yang dibentuk berdasarkan kesamaan ideologis cenderung akan awet dan kokoh. Begitu pula sebaliknya, jika pembentukan koalisi memiliki perbedaan ideologis akan semakin besar probabilitasnya perilaku pragmatis dan oportunistis dalam koalisi tersebut. Namun sering juga ditemui koalisi yang dibangun mengabaikan persoalan

ideologis dan lebih mementingkan pragmatis sehingga mengakibatkan komposisi partai politik koalisi berubah-ubah.

Koalisi dalam proses pembentukannya tidak secara acak diajak untuk bekerja sama hanya demi kemenangan semata. Partai politik di Indonesia yang banyak menjadi sebuah pertimbangan untuk lebih selektif dalam memutuskan mereka akan berkoalisi dengan partai politik yang mana. Kejituan dalam membentuk koalisi sejatinya berguna untuk urusan praktis, mempermudah menggalang suara pemilih, mendongkrak elektabilitas calon kepala daerah, memperlancar kampanye, tambahan sumber daya manusia, meningkatkan eksistensi partai politik, dan peluang menang lebih besar. Sebab itu, pembentukan koalisi tidak boleh tergesa-gesa agar segala bentuk tujuan dapat diraih dengan sukses.

Fenomena selanjutnya dalam pembentukan koalisi adalah antara pusat dan daerah memiliki diferensiasi mengenai komposisi partai politik. Seperti halnya, pada pemilu pemilihan presiden 2024 pasangan calon presiden nomor urut 1 yakni, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh gabungan partai politik (NasDem, PKB, dan PKS) dengan nama Koalisi Perubahan. Paslon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh gabungan partai politik (Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, dan Garuda) yang dinamai dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sedangkan pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diusung oleh gabungan partai politik (PDI-P, PPP, Perindo, dan Hanura). Berikut dengan perbedaan koalisi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung 2024, Pasangan calon nomor urut 1, yakni Dandan Riza Wardana dan Arif Wijaya diusung oleh gabungan parpol (PDI-P dan Demokrat). Pasangan calon nomor urut 2, yakni Haru Suandharu dan Ridwan Dani Wirianata yang diusung oleh gabungan parpol (PKS dan Gerindra). Pasangan nomor urut 3, yakni Muhammad Farhan dan Erwin diusung oleh gabungan parpol (NasDem, PKB, Gelora, dan Partai Buruh). Terakhir, pasangan calon nomor urut 4, yakni Arfi Rafnialdi dan Yena Iskandar Masoem yang diusung oleh gabungan parpol (Golkar, PSI, Garuda, PAN, dan Hanura).



Gambar 1. 1 Pasangan Calon Presiden 2024

Sumber: KPU Republik Indonesia



Gambar 1. 2 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2024

Sumber : KPU Kota Bandung

Berdasarkan gambar tersebut tampak bahwa koalisi yang terjalin antara pusat dan daerah memiliki perbedaan komposisi, hal tersebut sering terjadi dikarenakan perbedaan medan gerak dan konstelasi yang terjadi antara pusat dan daerah. Perbedaan bukan hanya ditemui dalam pilkada Kota Bandung saja, tetapi

akan dijumpai pula perbedaan koalisi partai politik antara pusat dan daerah di beberapa wilayah. Koalisi yang berbeda tersebut dinilai karena dinamika dan konfigurasi pusat dan daerah memiliki perbedaan pun juga dipengaruhi beberapa faktor seperti kekuatan partai politik di DPRD, mekanisme internal partai, para elit DPP partai, serta sosok dari para calon kandidat kepala daerah (, 2017).

Pilkada tahun 2024 yang dilaksanakan pada 27 November menjadi warna baru karena untuk pertama kalinya akan digelar secara serentak di seluruh wilayah nasional dan tidak berlakunya *threshold* 20% jumlah kursi Dewan Perwakilan Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu. Produk hukum yang mengatur pilkada serentak termaktub dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 8 yang berbunyi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024” (Republik Indonesia, 2016). Lalu tidak berlakunya ambang batas (*threshold*) 20% kursi DPRD dan 25% suara sah untuk kepala daerah pada pilkada 2024 melalui putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada 2024 (Mahkamah Konstitusi, 2024). Dengan Putusan MK tersebut maka ambang batas jumlah kursi di DPRD tidak berlaku, namun perolehan suara sah tetap ada tetapi persentasenya diturunkan dan disesuaikan dengan DPT di daerahnya masing-masing. Ambang batas tersebut pun berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah.

Putusan MK tersebut jelas mempengaruhi konstelasi politik di daerah Kota Bandung berkenaan dengan koalisi partai politik dalam mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota. Jumlah DPT Kota Bandung dilansir dari KPU Kota Bandung sebanyak 1.887.881 yang terdiri dari 932.468 laki-laki dan 955.413 perempuan. Dengan jumlah DPT Kota Bandung yang lebih dari 1.000.000 (satu) juta jiwa maka partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 6,5%. Ambang batas tersebut tergolong kecil karena telah direduksi sebanyak 18,5% dari sebelumnya 25%. Angin segar ini merupakan nafas baru bagi demokrasi

lokal yang lebih kompetitif dalam mengusung calon-calon kepala daerah khususnya Walikota dan Wakil Walikota Bandung.

Koalisi partai politik selalu terjalin salah satu faktornya adalah adanya ambang batas yang mengatur sehingga masing-masing dari mereka berbondong-bondong melakukan koalisi guna memenuhi syarat pencalonan. Lantas, ambang batas yang berlaku di Kota Bandung pada pilkada Walikota 2024 sebesar 6,5% menjadi arena yang menarik untuk dikaji bagaimana para partai politik ini berkoalisi tanpa harus khawatir dengan ambang batas yang terlampau tinggi dibandingkan dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung pada 2018. Berikut adalah tabel perolehan suara sah dalam pemilu DPRD Kota Bandung 2024 dengan DPT 1.872.381 dan suara sah 1458.721:

No	Partai Politik	Suara Sah	Persentase	Kursi DPRD	Persentase
1	PKB	110.805	7,6%	5	10%
2	GERINDRA	197.241	13,52%	7	14%
3	PDI-P	160.656	11,01%	7	14%
4	GOLKAR	175.600	12,04%	7	14%
5	NASDEM	138.731	9,51%	6	12%
6	BURUH	14.720	1,01%	-	-
7	GELORA	21.802	1,49%	-	-
8	PKS	297.937	20,42%	11	22%
9	PKN	1.588	0,11%	-	-
10	HANURA	8.152	0,56%	-	-
11	GARUDA	4.643	0,32%	-	-
12	PAN	64.242	4,40%	-	-
13	PBB	6.242	0,43%	-	-
14	DEMOKRAT	106.374	7,29%	3	6%
15	PSI	86.771	5,95%	4	8%
16	PERINDO	26.006	1,79%	-	-

17	PPP	26.728	1,83%	-	-
24	UMMAT	10.423	0,71%	-	-

Tabel 1. 1 Perolehan Suara Sah dan Jumlah Kursi DPRD Kota Bandung 2024

Sumber : olahan peneliti

Merujuk pada tabel 1.1 memperlihatkan bagaimana perolehan suara partai politik di Kota Bandung berpotensi tampilnya calon pasangan Walikota dengan jumlah banyak. Ambang batas yang 6,5% untuk mengusung calon pasangan Walikota Bandung seyogyanya bisa dilakukan oleh 7 partai tanpa harus melakukan koalisi, partai tersebut adalah PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, NasDem, PKS, dan Demokrat. Nyatanya pemilihan Walikota Bandung hanya diikuti oleh 4 pasang calon saja yang semuanya diusung oleh gabungan partai politik tanpa ada satu pun partai politik yang mengusung secara independen atau tanpa berkoalisi. Disitu pula disajikan perolehan kursi DPRD yang mana dimaksud banyaknya jumlah DPRD yang duduk di parlemen dapat menjadi faktor kunci koalisi parpol terbentuk. Dominasi parlemen akan mempermudah jalannya pemerintahan dan setiap kebijakan yang akan menjadi program maupun keputusan.

Penguasaan parlemen dalam menentukan koalisi sebagai alat untuk memaksimalkan kekuasaan (*office seeking*) dan mempermudah dalam menjangkau suara karena jarak antara Pemilu dan Pilkada Kota Bandung hanya berjarak beberapa bulan serta masih dalam tahun yang sama. Sebagaimana yang dimaksud oleh Lijpart dalam bukunya "*Patterns of Democracy*" (Lijphart, 2012) dalam jenis koalisi *minimal winning coalition* bahwa koalisi partai politik harus mencapai posisi mayoritas di parlemen cukup dengan menguasai 50+1 kursi parlemen, tanpa harus melibatkan lagi yang lain. Pada hakikatnya setiap partai politik lebih berfokus pada pragmatis yang semata-mata hanya untuk memperoleh kekuasaan. Koalisi demikian dinamakan koalisi taktis.

Koalisi partai politik dalam momentum pilkada Kota Bandung dalam setiap gelarannya memiliki jenis, bentuk, dan komposisi yang berbeda dari waktu ke waktu. Pemilihan Walikota Bandung yang secara langsung dipilih oleh masyarakat dimulai pada tahun 2008 dengan kontestan sebanyak 3 pasangan calon yang

diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dan independen, berlanjut dengan pilkada Kota Bandung tahun 2013 yang menghadirkan kontestan melimpah sebanyak 8 pasangan calon yang dikendarai oleh 4 calon gabungan partai dan 4 calon independen. Pilkada 2018 Kota Bandung memunculkan 3 pasangan calon atas dukungan dari gabungan koalisi partai politik tanpa ada calon independen, sedangkan untuk kontestasi elektoral tahun 2024 Pilkada Kota Bandung diikuti oleh 4 peserta pasangan calon yang diusung oleh gabungan koalisi partai politik dan lagi-lagi tidak diikuti oleh calon independen. Berikut tabel perbandingan koalisi partai politik dari setiap agenda Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung dari 2008-2024:

Tahun 2008	Tahun 2013	Tahun 2018	Tahun 2024
GOLKAR, PAN, DEMOKRAT, PDI-P, PPP, PBB	DEMOKRAT, HANURA, PBB, PPP	PKB, DEMOKRAT, GOLKAR	PDI-P DAN DEMOKRAT
	PKS DAN GERINDRA	NASDEM, HANURA, PDI-P, PPP	PKS DAN GERINDRA
PKS	PDI-P DAN PAN	PKS DAN GERINDRA	NASDEM, PKB, GELORA, BURUH,
	GOLKAR, PDS, PIS, PATRIOT, PPDI		GOLKAR, PSI, PAN, HANURA, GARUDA

Tabel 1. 2 Koalisi Parta Pengusung Pilkada Kota Bandung 2008, 2013, 2018, dan 2024

Sumber: Olahan Peneliti

Uraian tabel diatas menjelaskan bagaimana pembentukan koalisi partai politik dalam mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung selalu berubah ubah terkecuali partai Gerindra dan PKS yang selalu berdampingan dalam setiap agenda politik di Kota Bandung. Dapat dikatakan bahwa koalisi hanya sebatas momentum atau nama lainnya insidental, lebih tepatnya koalisi tidak

bersifat menetap (Yaqin, 2021). Disana juga dapat dicermati bagaimana tidak ada partai politik yang berkoalisi berdasarkan kesamaan ideologi masing-masing partai. Sulitnya di prediksi partai politik akan penentuan mereka akan bergandengan dengan siapa di Kota Bandung, hal tersebut disebabkan oleh lokus partai dengan mendahulukan kemenangan mayoritas dan pembagian kekuasaan apabila kandidat yang diusung menang.

Pilkada Kota Bandung 2024 menarik untuk dikaji bagaimana terjadi beberapa aturan baru yang mengatur dan berimplikasi terhadap pembentukan koalisi partai politik, khususnya koalisi pengusung Farhan-Erwin yang terdiri dari 4 partai yakni NasDem, PKB, Gelora, dan Buruh dan memiliki slogan “Bandung Utama”. Menariknya, pasangan ini merupakan figur yang digadang-gadang akan menjadi calon Walikota yang akan berhadapan karena masing-masing dari mereka telah memasang baliho dengan foto mereka dengan tulisan Calon Walikota Bandung. Namun, mereka pada akhirnya berdampingan untuk memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Erwin yang merupakan Ketua DPC PKB Kota Bandung di spekulasikan akan menjadi Calon Walikota dan Farhan yang menjadi Calon Wakil Walikota karena kedudukan Erwin selaku pimpinan partai dan pastinya memiliki andil besar dalam memilih koalisi bagi PKB, tetapi nyatanya prediksi itu berbalik dengan Farhan menjadi Calon Walikota dan Erwin menjadi Calon Wakil Walikota. Hal demikian tidak terlepas dari lobby politik dan penyelarasan visi koalisi parpol yang matang sehingga koalisi tersebut dapat terealisasi. Koalisi Utama menorehkan keberhasilan dengan ditetapkannya Farhan-Erwin menjadi Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung.

Berfokus pada Partai Politik NasDem dan PKB dalam Pilkada Kota Bandung tahun 2018 mereka tidak tergabung kedalam koalisi yang sama. Dapat ditinjau pula dalam tabel 1.1 dimana pada tahun 2018 Nasdem dan PKB bersebrangan dan menjadi rival untuk memenangkan Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung 2018-2023. PKB pada saat itu tergabung dalam koalisi yang berisikan PKB, DEMOKRAT, dan GOLKAR dengan mengusung pasangan calon yaitu Nurul Qomaril Arifin – Chairul Yaqin Hidayat. Sedangkan NasDem

berkoalisi dengan HANURA, PDI-P, dan PPP yang mengusung pasangan calon Yossi Irianto – Aries Supriatna. Namun dari dua pasangan calon dan koalisi tersebut harus takluk dari petahana Walikota Bandung yakni Oded Mohamad Danial – Yana Mulyana yang diusung oleh koalisi PKS dan Gerindra.

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1. Nurul Qomaril Arifin – Chairul Yaqin Hidayat	301.481	23,8%
2. Yossi Irianto – Aries Supriatna	330.730	26,1%
3. Oded Mohamad Danial – Yana Mulyana	634.682	50,1%

Tabel 1. 3 Perolehan Suara Sah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2018

Sumber : KPU Kota Bandung

Tabel 1.3 Tersebut membuktikan bahwa kemenangan harus diraih oleh koalisi PKS dan Gerindra. NasDem dan PKB yang memang tidak berkoalisi harus menerima kekalahan mereka pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2018. Namun, pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2024 NasDem dan PKB membentuk sebuah koalisi yang meraih kemenangan. Hal tersebut menarik untuk dikaji bagaimana NasDem dan PKB yang sebelumnya belum pernah tergabung dalam koalisi yang sama dalam pilkada Kota Bandung, tetapi pada 2024 membentuk koalisi yang solid. Lantas apa yang menjadi latarbelakang pada saat 2018 mereka tidak berkoalisi sedangkan pada 2024 mereka berkoalisi, sebab secara historis partai tersebut belum pernah melakukan kerjasama politik dan tergabung dalam koalisi yang sama.

Awalnya koalisi ini dipelopori oleh NasDem yang mengajukan nama Muhammad Farhan kepada PKB yang disambut langsung oleh ketua DPC yakni Erwin sendiri. Koalisi ini pada mulanya hanya berisikan dua partai NasDem dan PKB. Pasangan Farhan-Erwin pertama kali diresmikan di Hotel Fairmont, Jakarta, 18 Agustus 2024 dengan diserahkannya B1-KWK oleh Ketua Umum PKB,

Muhaimin Iskandar. Koalisi Nasdem-PKB yang memiliki 11 kursi di parlemen telah memenuhi syarat ambang batas parlemen bahkan melebihi, yaitu 22%. Dua hari berselang pada 20 Agustus 2024, belokasi di Kantor DPW NasDem Jabar B-1 KWK diserahkan oleh Ketua DPW Nasdem, Saan Mustopa. Tepat pada hari itu juga Selasa, 20 Agustus 2024 putusan MK Nomor 60 mengenai ambang batas diputuskan. Respon dari koalisi Farhan-Erwin menegaskan bahwa koalisi ini telah dibentuk jauh sebelum putusan MK tersebut dibacakan, kami komitmen dan kami solid. Mereka memiliki visi menjadikan Bandung Nasionalis-religius.

Putusan MK tentunya mempengaruhi koalisi dan konstelasi di beberapa daerah di Indonesia. Begitu pula dengan Pilkada Kota Bandung, dimana partai-partai non parlemen mulai melakukan gerilya politik untuk dapat turut andil dan bergabung dalam koalisi. Pada saat 29 Agustus 2024 Koalisi Nasdem-PKB mendapatkan tambahan koalisi dengan bergabungnya partai Buruh dan Partai Gelora yang dideklarasikan secara resmi di Kantor DPD NasDem Kota Bandung. Dengan hari yang sama pula koalisi Nasdem, PKB, Buruh, dan Gelora mengantarkan pendaftaran Farhan-Erwin menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung ke KPU Kota Bandung.

Koalisi NasDem dan PKB memiliki tantangan yang besar serta usaha kolektif yang harus diusahakan secara superlatif. Kota Bandung telah dikuasai selama 10 tahun oleh PKS dan Gerindra, koalisi ini tidak pernah berubah sejak Pemilihan Walikota Bandung 2013. Dimulai dengan Pemilihan Walikota Bandung 2013 PKS-Gerindra berkoalisi untuk mengusung Ridwan Kamil dan alm Oded Muhammad Danial. Pada Pemilihan Walikota Bandung 2018 selanjutnya mengusung alm Oded Muhammad Danial dan Yana Mulyana. Terakhir Pemilihan Walikota Bandung 2024 koalisi ini mengusung Haru Suandharu dan Ridwan Dani Wirianata. PKS-Gerindra mengusung Koalisi ini seakan-akan aliansi yang memiliki kerjasama yang abadi dan komitmen yang kuat, meskipun mereka memiliki ideologi yang berbeda. PKS berideologikan islam sedangkan Gerindra berideologikan nasionalis, tetapi itu tidak menjadikan halangan untuk koalisi PKS-Gerindra ini dapat terawat sampai 11 tahun lamanya. Anomali tersebut tidak

biasanya ditemukan dalam koalisi partai politik di Indonesia karena umumnya mereka melakukan politik nomadisme.

Koalisi PKS-Gerindra dengan kandidasinya Haru Suandharu dan Ridwan Dani Wirianata diprediksi akan memenangkan Pemilihan Walikota Bandung 2024 karena dominasi PKS dan Gerindra di Kota Bandung, dengan PKS yang merupakan pemenang pemilu di 2024 Kota Bandung dengan urutan pertama dan Gerindra di urutan nomor dua. Perolehan suara yang melipah keduanya pada pemilu sebelumnya dan 18 kursi parlemen (36%) sudah cukup mampu untuk menyimpulkan kemenangan bagi koalisi ini. Namun, masuknya Partai Gelora kedalam Koalisi Bandung Utama memecah suara dari PKS itu sendiri, sebagaimana ketua umum sekaligus pendiri Gelora, Anis Matta merupakan mantan Sekjen PKS dan beberapa politisi Gelora merupakan mantan kader PKS yang dipecat. Perpecahan juga terjadi dalam tubuh koalisi tersebut, dimana Partai Gerindra menjadi dualisme karena setengah dari mereka lebih ingin mengukung Sonny Salimi dibandingkan Dani. Namun, Dani yang merupakan aspri Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto lebih diresmikan untuk menjadi kandidat. Ditambah pula kepercayaan masyarakat menurun atas ulah Yana Mulyana Walikota Bandung yang merupakan kader Gerindra yang terjerat kasus korupsi.

Dengan perpecahan di tubuh Gerindra dan dipecatnya belasan ketua beserta pimpinan PAC Gerindra di berbagai Kecamatan atas penolakan mendukung Dani Wirianata. Reaksi Mantan pengurus PAC Gerindra Kota Bandung yang diturunkan dari jabatannya, mengalihkan dukungannya kepada Farhan-Erwin untuk Walikota dan Wakil Walikota Bandung. Para mantan pengurus PAC Gerindra ini membentuk sebuah gerakan relawan yang dinamai REFERENDUM yang merupakan kepanjangan dari Relawan Farhan-Erwin untuk Bandung Utama. Dukungan yang berasal dari Referendum ini mendeklarasikan dukungannya kepada Farhan-Erwin pada 14 Oktober 2024 di Kantor DPD NasDem Kota Bandung.

Gerakan Referendum tersebut tidak hanya diisi oleh para mantan pengurus PAC Gerindra Kota Bandung saja, melainkan dari unsur Resonansi Kota Bandung, Komunitas Bandung Bersemi, Sora Muda, Forum Alumni BEM Kota Bandung.

Tambahan Personilia menimbulkan optimis yang besar dari koalisi NasDem, PKB, Buruh, dan Gelora untuk memenangkan kontestasi. Lengkap sudah komposisi koalisi partai politik Bandung Utama, mereka memiliki kekuatan politik masing-masing dengan konstituen yang beragam. NasDem dengan pemilih nasionalis, PKB dengan pemilih islam konservatif atau masyarakat NU, partai Buruh dengan pemilih mayoritas Buruh, dan Gelora pemilih islam modern. Koalisi ini faktanya membuahkan hasil yang manis, dengan memenangkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2024. pada 6 Desember 2024 Farhan-Erwin ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandung. Berikut tabel perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung :

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1. Dandan Riza Wardana-Arif Wijaya	83.498	7,13%
2. Haru Suandharu-Ridwan Dani Wirianata	427.448	36,48%
3. Muhammad Farhan-Erwin	523.000	44,64%
4. Arfi Rafnialdi -Yena Iskandar Masoem	137.672	11,75%

Tabel 1. 4 Perolehan Suara Sah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2024

Sumber : KPU Kota Bandung

Berdasarkan tabel 1.3 pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2024 dimenangkan oleh calon nomor 3, yakni Muhammad Farhan dan Erwin dengan perolehan suara sah 523.000 (44,64%), perolehan suara kedua terbanyak adalah pasangan Haru Suandharu dan Ridwan Dani Wirianata dengan perolehan suara sah 427.448 (36,48%), suara terbanyak ketiga adalah pasangan Arfi Rafnialdi dan Yena Iskandar Masoem mendapatkan perolehan suar sah 137.672 (11,75%), sedangkan perolehan suara terkecil adalah pasangan Dandan Riza-Arif

Wijaya atas perolehan suara sah 83.498 (7,13%). Atas hasil yang dirilis hasil suara sah dan telah ditetapkannya Farhan-Erwin sebagai pemenang oleh KPU Kota Bandung, membuktikan kejituan dari koalisi yang dibentuk dan meruntuhkan dominasi PKS-Gerindra menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bandung.

Koalisi Bandung Utama telah berhasil memenangkan pesta demokrasi pilkada Kota Bandung 2024, tetapi menarik untuk ditelaah lebih komprehensif bagaimana koalisi tersebut dapat terbentuk. Melihat dari ideologi atau platform masing-masing partai tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Koalisi taktis didasari atas aspek kepentingan memperoleh kekuasaan sedangkan koalisi strategis yang dilandasi aspek ideologis (Efriza, 2012). Idealnya menurut Efriza bahwa koalisi dengan bentuk strategis lebih memiliki banyak keunggulan dibandingkan koalisi taktis. Namun faktanya, banyak koalisi yang dibentuk secara fundamental bukan berasaskan ideologi. Dengan itu, mencerminkan bahwa identitas dan ideologi partai dapat dikesampingkan dengan ganjaran sebuah kemenangan. Selaras dengan pendapat Lijphart (Lijphart, 2012) bahwa koalisi yang terbaik adalah koalisi yang berjenis *minimal connected winning coalitions* dan terbaik kedua adalah *minimal range coalitions*, karena keduanya mempertimbangkan ideologi dalam membentuk koalisi. Sedangkan koalisi yang kurang baik adalah *minimal winning coalitions*, sebab koalisi ini bertujuan mengamankan kemenangan mayoritas dan menabrak platform maupun ideologi partai demi sebuah kekuasaan. Namun nyatanya koalisi yang dibentuk di Indonesia lebih banyak berjenis *minimal winning coalitions* karena orientasinya adalah menang, didasari kalkulasi dan elektabilitas maka hal-hal yang bersifat esensial akan dikesampingkan. Maka, peneliti sangat tertarik untuk menelusuri dengan meneliti proses pelaksanaan pembentukan koalisi partai politik pengusung Farhan-Erwin dan faktor-faktor yang mendasari pembentukan koalisi partai politik Farhan-Erwin.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti lebih lanjut akan mengkaji dan meneliti permasalahan melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pembentukan koalisi partai politik pengusung Farhan-Erwin?
2. Faktor-faktor yang mendasari pembentukan koalisi partai politik Farhan-Erwin?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan proses pelaksanaan pembentukan koalisi partai politik pengusung Farhan-Erwin.
2. Menggambarkan Faktor-faktor yang mendasari pembentukan koalisi partai politik Farhan-Erwin.

C. Kegunaan Penelitian

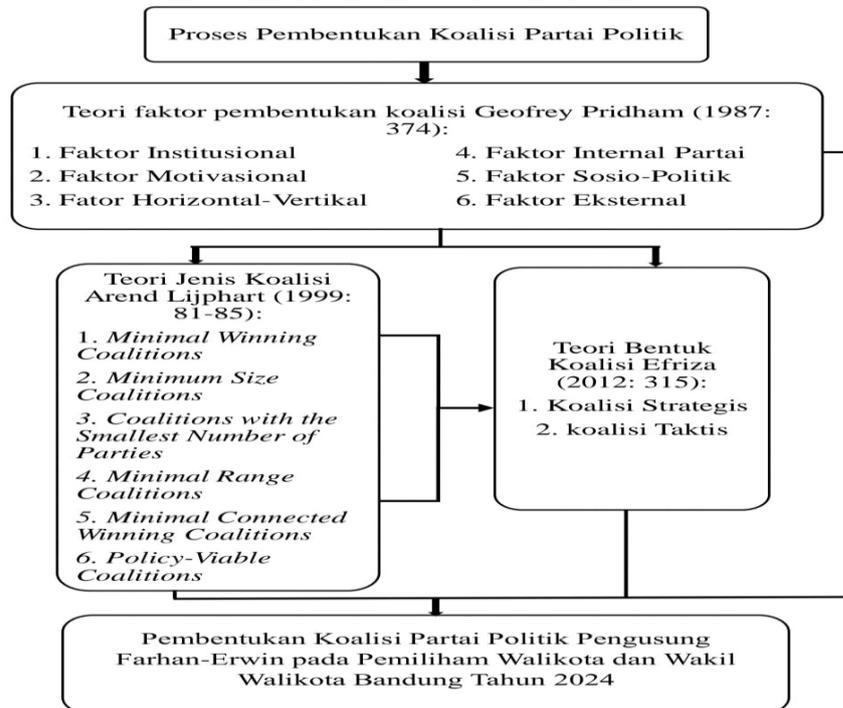
Adapun manfaat dari manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan kontribusi guna perkembangan ilmu pengetahuan dengan disiplin ilmu politik, terutama berkenaan dengan partai politik dan koalisi partai politik.
 - b. Menjadi rujukan bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk mengembangkan khazanah pengetahuan koalisi partai politik dalam ranah konstestasi elektoral, khususnya di Kota Bandung.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi peneliti, dapat mengeksplorasi serta menambah pengetahuan secara mendetail mengenai bagaimana proses koalisi itu bisa terbentuk dan melakukan kerja sama politik demi tujuan yang sama.
 - b. Bagi publik, memberikan informasi berupa pandangan baru atas dinamika dan konstelasi yang terjadi selama pembentukan koalisi partai politik sehingga pemilih lebih arif dan jeli melihat atas fakta-fakta politik yang ada.
 - c. Bagi partai politik, menjadi bahan panduan untuk lebih selektif dalam melakukan pembentukan koalisi, bukan hanya melihat dari

pragmatisnya saja, melainkan ideologi dan platform partai mesti dijunjung.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berdasarkan kerangka berfikir sebagaimana gambar dibawah:



Gambar 1. 3 Kerangka Befikir

Sumber: Olahan Peneliti

Koalisi partai politik pengusung Farhan-Erwin yang dinamai dan memiliki slogan “Bandung Utama” patut di apresiasi atas kemenanganya dalam kontestasi elektoral Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 dan memicu penulis untuk mengidentifikasi bagaimana dinamika yang terjadi sampai soliditas tercipta pada koalisi ini. Pastinya terdapat beberapa faktor pertimbangan dari pelopor atau inisiator dalam menentukan partai mana saja yang perlu digandeng dan tidak perlu digandeng. Ditambah terdapat kebijakan partai yang pastinya menjelaskan aturan main dari mekanisme internal partai untuk selektif dalam penciptaan koalisi yang kokoh dan berkelanjutan. Koalisi Bandung Utama

sepertinya memiliki coraknya tersendiri yang masuk kedalam jenis koalisi. Perlu juga ditinjau dari fakta-fakta yang ditemukan bahwa koalisi Bandung Utama memiliki bentuk bagaimana, orientasi lebih kearah pragmatis atau ideologis dalam menjalankan pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan teori koalisi dari Geoffrey Pridham (Pridham, 1987) tentang teori faktor pembentukan partai politik yang terdiri dari 6 faktor: faktor institusional, faktor motivasional, faktor horizontal-vertikal, faktor internal politik, faktor sosial-politik, dan faktor eksternal. Teori tersebut sebagai alat analisa peneliti untuk mengetahui kronologi pembentukan koalisi partai pengusung Farhan-Erwin. Keenam faktor tersebut merupakan indikator kunci sebagai penilaian untuk mengidentifikasi jenis dari koalisi Bandung Utama.

Mengetahui bagaimana penjelasan faktor pembentukan koalisi partai politik Bandung Utama, maka tindakan selanjutnya adalah mensinkronisasi dengan teori kedua milik Arend Lijphart (Lijphart, 2012) mengenai teori jenis koalisi, terdapat 6 jenis teori koalisi, yaitu: *minimal winning coalitions*, *minimum size coalitions*, *coalitions with the smallest number of parties*, *minimal range coalitions*, *minimal connected winning coalitions*, *policy-viable coalitions*. Berdasarkan ciri-ciri dari faktor-faktor yang menentukan pembentukan koalisi Bandung Utama dan fakta-fakta yang didapat, maka peneliti dapat mengasumsikan koalisi tersebut di kategorisasikan koalisi seperti apa atau yang mendekati. Sebab teori tersebut digunakan dalam studi kasus 36 negara demokrasi di seluruh dunia, meskipun tidak terdapat Indonesia yang menjadi salah satu sampel penelitian, namun penulis optimis bahwa teori tersebut bisa di aplikasikan dengan konteks di Indonesia, khususnya Koalisi Politik pengusung Farhan-Erwin.

peneliti akan menelaah lebih jauh berkenaan dengan motivasi orientasi koalisi Bandung Utama, lebih mengarah kepada bentuk koalisi seperti apa baik sebelum dan sesudah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Teori yang digunakan untuk menelisik hal tersebut menggunakan teori koalisi dari Efriza (Efriza, 2012) mengenai bentuk koalisi, terdapat dua bentuk yakni: koalisi taktis (pragmatis) dan koalisi strategis (ideologis). Faktor pembentukan dan jenis

pembahasan sebelumnya diamati dan dicermati karena masing-masing variabel tersebut dalam menentukan koalisi tersebut tergolong koalisi taktis atau strategis. Karena pada hakikatnya koalisi yang dibangun akan kembali kepada 2 bentuk, apakah itu koalisi taktis atau koalisi strategis.

Dengan menguji semua teori yang ada ditambah dengan fakta dilapangan maka peneliti dapat menyimpulkan dengan pasti mengenai Koalisi Bandung Utama. Karena sejatinya koalisi adalah sebuah keniscayaan dalam demokrasi dengan sistem multipartai sebagai sarana memperoleh kekuasaan maupun mempertahankan keuasaan, sudah sepatutnya institusi partai politik dalam menjaring koalisi dengan berasaskan konsep yang ideal dan substantif.

